



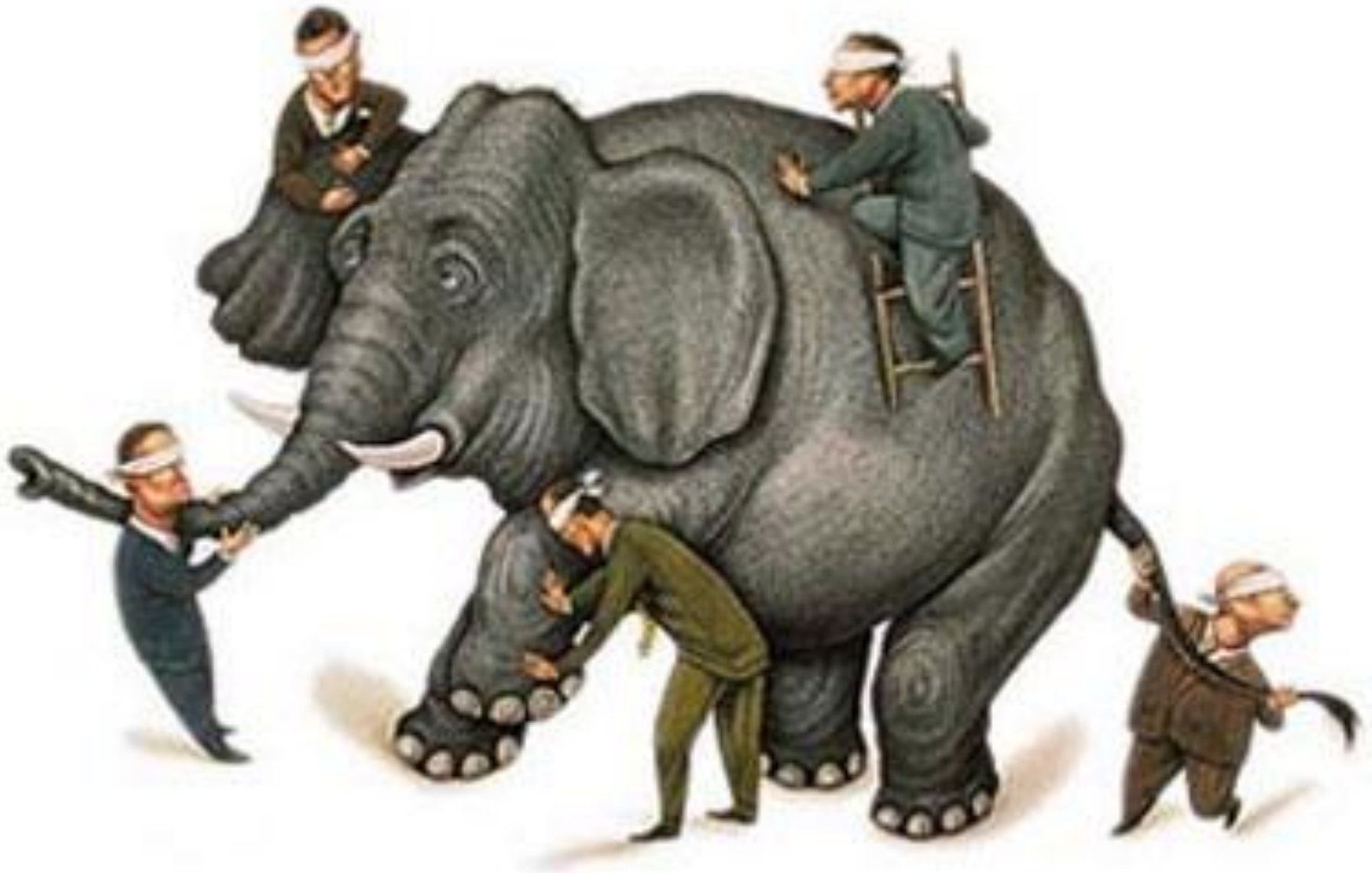
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Disampaikan oleh :
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali

Ir. Ketut Lihadnyana, M.MA

Pembekalan Umum KKN-PPM Universitas Udayana





PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA????



PROVINSI BALI



PROVINSI BALI dibagi menjadi 8 Kabupaten dan 1 Kota, **57** Kecamatan, **636 Desa** dan 80 Kelurahan, serta secara adat terdiri dari **1.488** Desa Pekraman dan **4297** Banjar.

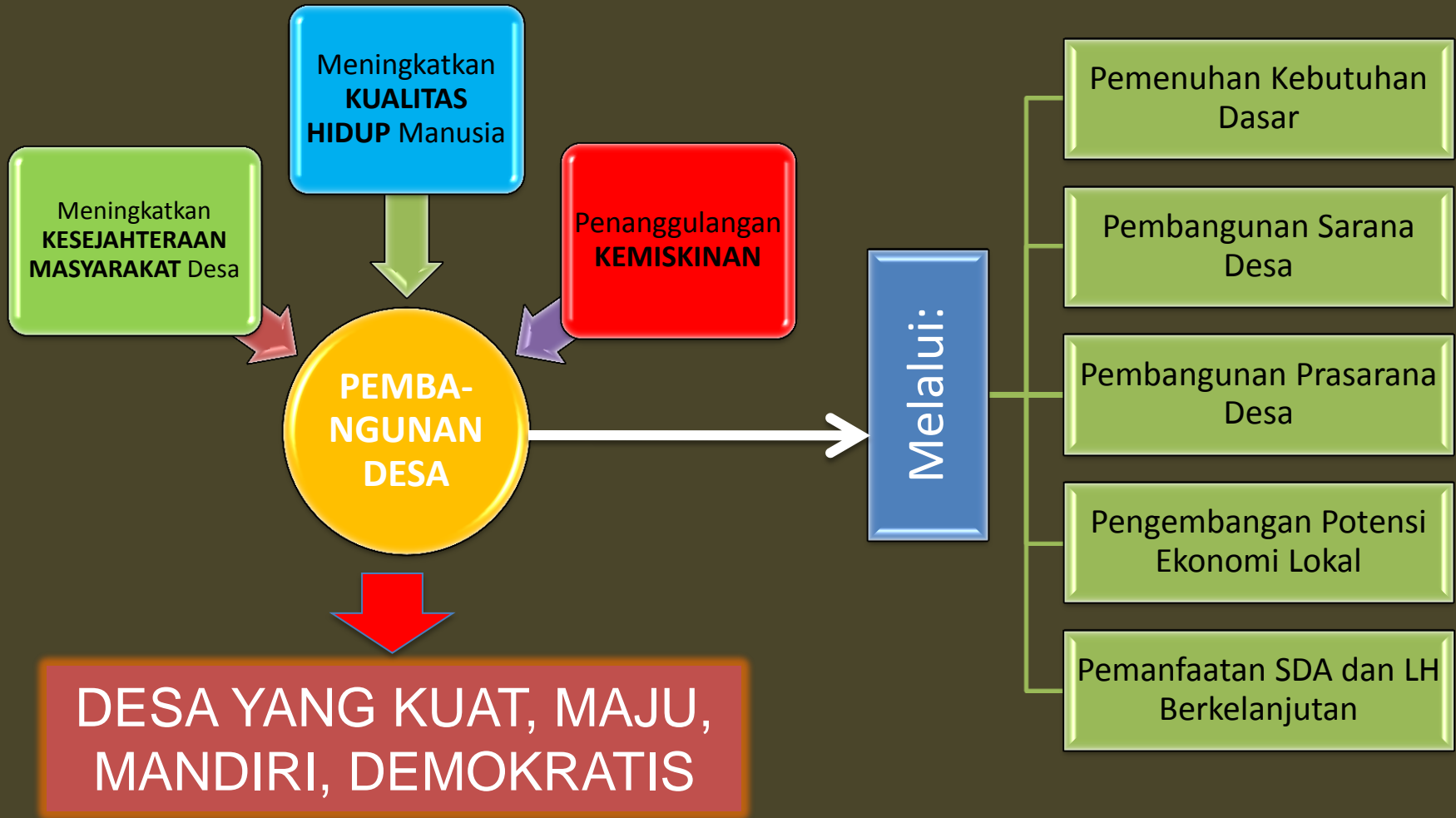
LUAS WILAYAH PULAU BALI :
5.636,66 KM²

JUMLAH PENDUDUK BALI
4.104.900 JIWA

Wilayah Bali terbagi menjadi 6 wilayah daratan (pulau) yaitu **Pulau Bali** sebagai pulau terbesar, **Pulau Nusa Penida**, **Pulau Nusa Ceningan**, **Pulau Nusa Lembongan**, **Pulau Serangan** dan **Pulau Menjangan**

TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

(Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)



Ketidakberdayaan Desa

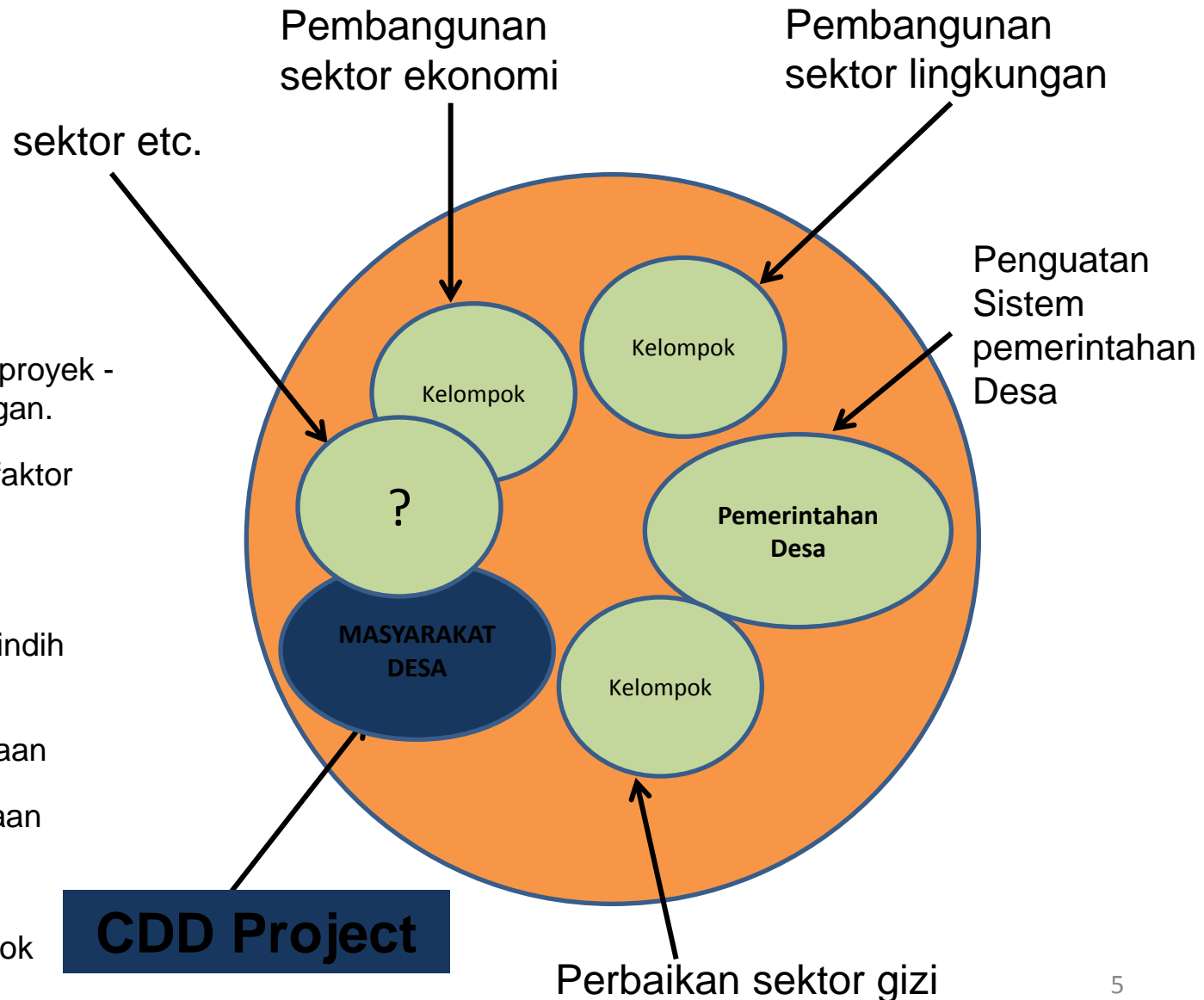
Desa Sebagai **OBJEK** Pembangunan:

Di tingkat makro

- Pembangunan bersifat proyek - > tidak berkesinambungan.
- Lokasi tidak merata -> faktor politik sangat berperan.

Di Tingkat Mikro

- Fragmentasi/tumpang tindih kegiatan
- Fragmentasi kelembagaan
- Fragmentasi perencanaan
- Fragmentasi keuangan
- Tumpang tindih kelompok sasaran



Undang-Undang Desa :

sebagai Landasan Hukum Pemberdayaan Masyarakat Desa.

UU Desa Pasal 112 Ayat (3):

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:

- a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
- b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, dan
- c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

PP 43/2014 Pasal 126

- 1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

PP 43/2014 Pasal 127

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan **secara swakelola** oleh Desa;
 - b. mengembangkan program dan kegiatan **pembangunan Desa secara berkelanjutan** dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
 - c. menyusun **perencanaan pembangunan Desa** sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang **berpihak** kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e. mengembangkan sistem **transparansi** dan **akuntabilitas** dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
 - f. **mendayagunakan** lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
 - h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
 - i. melakukan **pendampingan** masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
 - j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Komponen Pokok Pemberdayaan Masyarakat Desa





Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa





Strategi Entaskan Kemiskinan



4

strategi dasar percepatan penanggulangan kemiskinan



1 Optimalisasi program perlindungan sosial



2 Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar



3 Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin



4 Menciptakan pembangunan yang inklusif

kurangi beban & tambah pendapatan

Pelaksanaan 4 strategi percepatan penanggulangan kemiskinan diterapkan dalam 3 klaster:

klaster I Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga

klaster III Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

klaster II Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat



1. Penyempurnaan data penerima manfaat
2. Menemukenali permasalahan sosial (diagnosa kemiskinan)

JIKA TIDAK SEGERA DITANGGULANGI

Dampak Kemiskinan :

1 Meningkatnya Jumlah Pengangguran

Ketrampilan kerja yang rendah mengakibatkan masyarakat miskin sulit mengakses pekerjaan formal

2 Tingginya Angka Kriminalitas



Akibat tekanan kemiskinan, seseorang bisa berpotensi melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

3 Bertambahnya Jumlah Usia Putus Sekolah



Anak terpaksa berhen untuk ikut bekerja me ekonomi keluarga

4 Munculnya Fenomena Pekerja Anak

Anak dalam keluarga miskin cenderung dilihat sebagai obyek penghasil uang secara instan

5 Akses Kesehatan Sulit Terjangkau



Biaya berobat yang tinggi membuat keluarga miskin semakin sulit mengakses fasilitas kesehatan

6 Terancamnya Perkembangan Generasi Penerus



Lemahnya pengawasan mengakibatkan remaja terhadap potensi per NAPZA

BUTUH KERJA



Strategi dasar percepatan penanggulangan kemiskinan



C
L
U
S
T
E
R

klaster II Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat



Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin



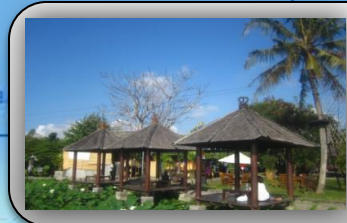
MELALUI MISI

Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Batin.



"Terwujudnya Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera"

GERBANGSADU
Gerakan Pembangunan
Desa Terpadu



Penataan
BUMDesa,
Penguatan
Kelembagaan
BUMDesa

Sampai
dengan Tahun
2016

217 Desa

Pembinaan,
pendampingan
dalam
pengembangan
usaha dan
kewirausahaan
masy. desa

Penanggulangan
kemiskinan dan
pengembangan
usaha
ekonomi
masyarakat
Desa

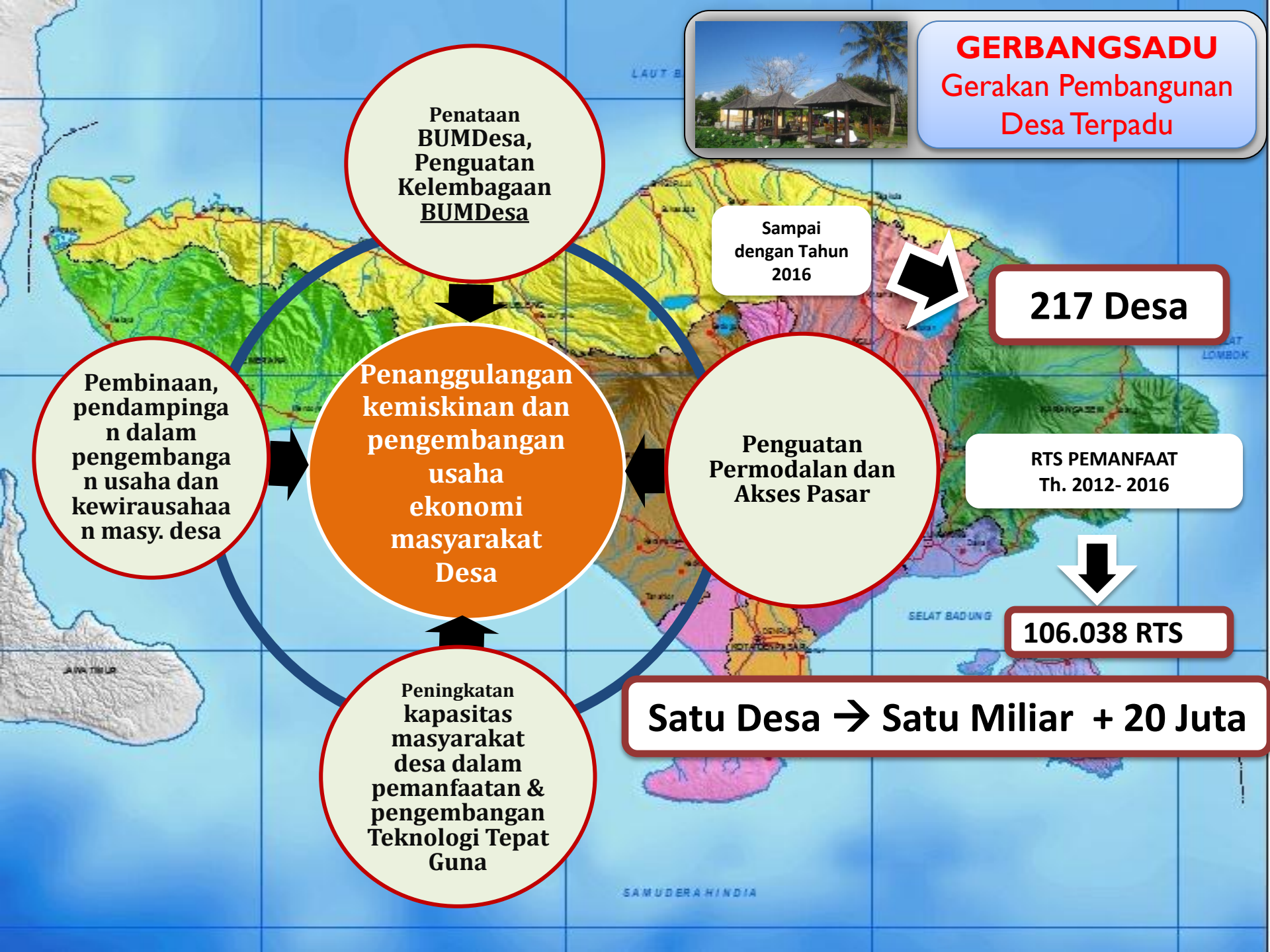
Penguatan
Permodalan dan
Akses Pasar

RTS PEMANFAAT
Th. 2012- 2016

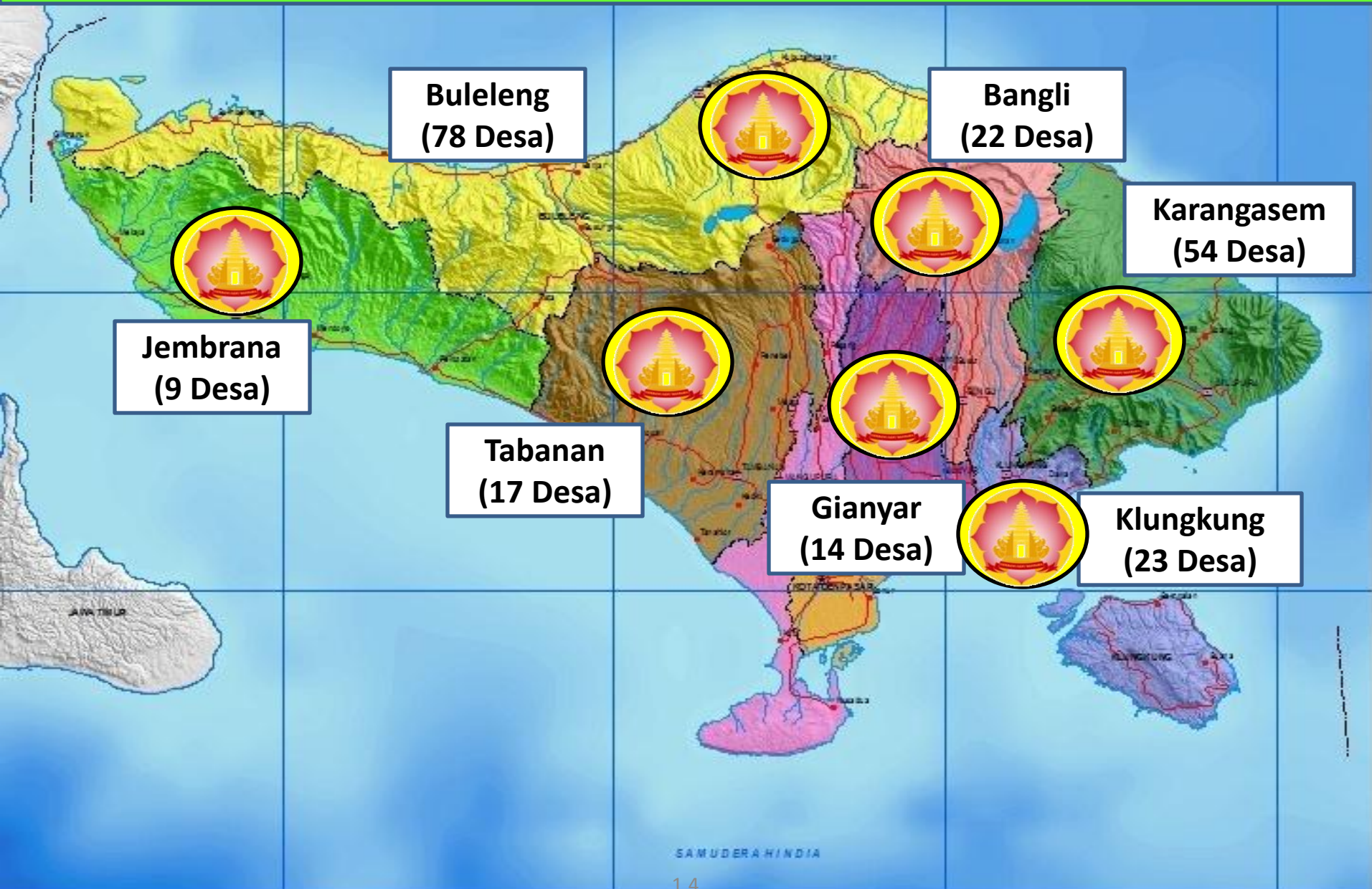
106.038 RTS

Peningkatan
kapasitas
masyarakat
desa dalam
pemanfaatan &
pengembangan
Teknologi Tepat
Guna

Satu Desa → Satu Miliar + 20 Juta



PETA LOKASI PROGRAM GERBANGSADU MANDARA



SEBARAN BUM DESA DI PROVINSI BALI S.D. TAHUN 2016

NO.	KABUPATEN	BUM DESA DIBENTUK MELALUI GSM	BUM DESA DIBENTUK DILUAR GSM	JMLH BUMDesa
1.	JEMBRANA	9	31	40
2.	TABANAN	17	55	72
3.	BADUNG	-	13	13
4.	GIANYAR	14	-	14
5.	KLUNGKUNG	23	5	28
6.	BANGLI	22	7	29
7.	KARANGASEM	54	9	63
8.	BULELENG	78	7	85
9.	DENPASAR	-	6	6
JUMLAH		217	133	350



IMPLEMENTASI DANA DESA

PROVINSI BALI



DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015-2017

MENURUT KAB./KOTA SE-BALI

NO	KAB./KOTA	JML. DESA	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017	
			JUMLAH (000)	RATA2 PER DESA (000)	JUMLAH (000)	RATA2 PER DESA (000)	JUMLAH (000)	RATA2 PER DESA (000)
1	Jembrana	41	12.410.047	302.684	27.863.479	679.597	36.475.565	889.648
2	Tabanan	133	37.068.940	278.713	83.183.813	625.442	106.417.874	800.134
3	Badung	46	13.826.342	300.572	31.046.783	674.930	40.315.619	876.426
4	Gianyar	64	19.166.561	299.477	43.035.691	672.432	55.753.828	871.153
5	Klungkung	53	15.260.569	287.935	34.259.137	646.398	44.540.097	840.379
6	Bangli	68	19.197.775	282.320	43.090.305	633.680	55.783.753	820.349
7	Karangasem	75	21.962.811	292.837	49.301.984	657.359	63.682.742	849.103
8	Buleleng	129	36.812.689	285.369	82.620.493	640.468	105.860.971	820.628
9	Denpasar	27	9.723.248	360.120	21.863.005	809.740	28.428.056	1.052.891
JUMLAH		636	185.428.983	298.891	416.264.690	671.116	537.258.505	868.967

Prinsip-Prinsip Penggunaan Dana Desa 2017



Keadilan

**Kebutuhan
Prioritas**

**Tipologi
Desa**

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017



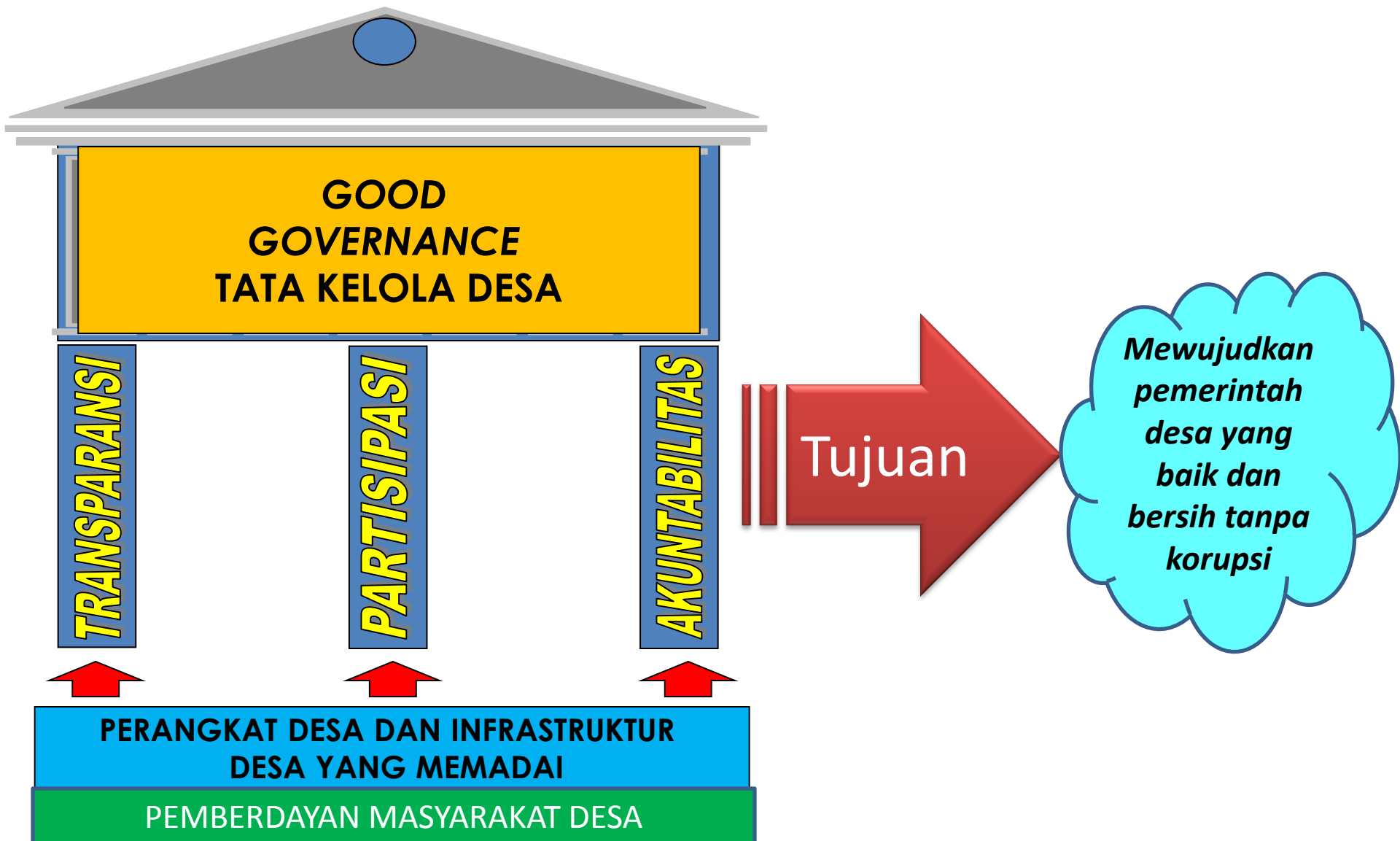
**Pembangunan
Desa**

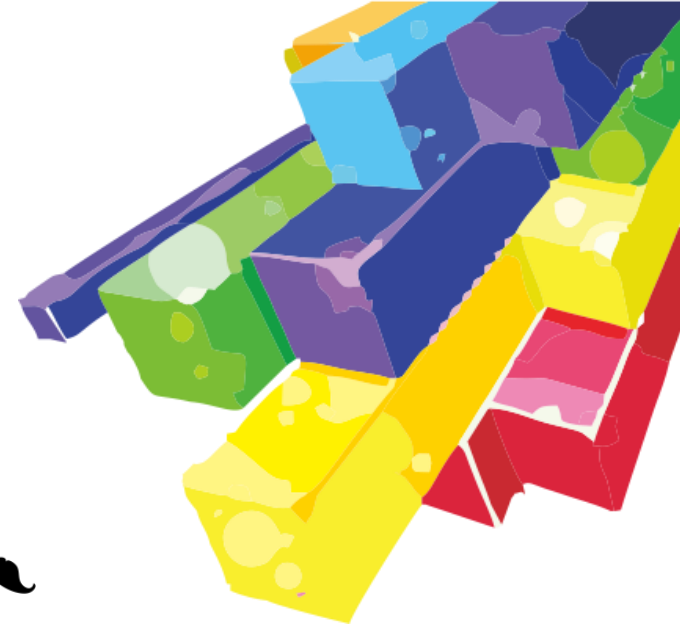
**Untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
Desa dan kualitas hidup
manusia serta
penanggulangan kemiskinan**

**Pemberdayaan
Masyarakat
Desa**

**Untuk meningkatkan
kapasitas warga atau
masyarakat desa dalam
pengembangan wirausaha,
peningkatan pendapatan,
serta perluasan skala
ekonomi individu warga
atau kelompok masyarakat
dan desa**

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA





CAPAIAN PEMERINTAH PROVINSI BALI



PERTUMBUHAN EKONOMI TW IV TAHUN 2016 BALI DAN NASIONAL

IPM

INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA



6,26%

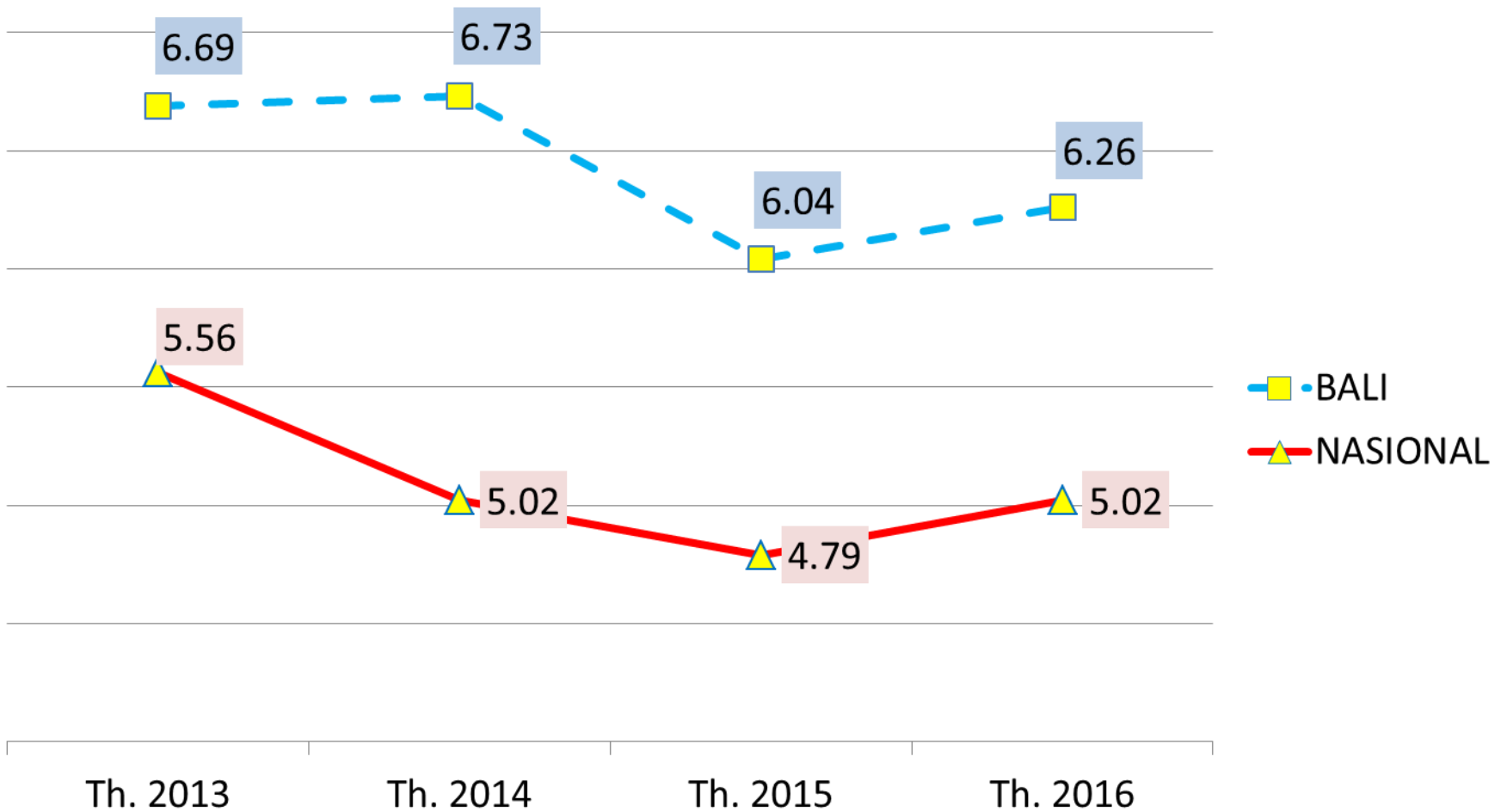
BALI

5,02 %

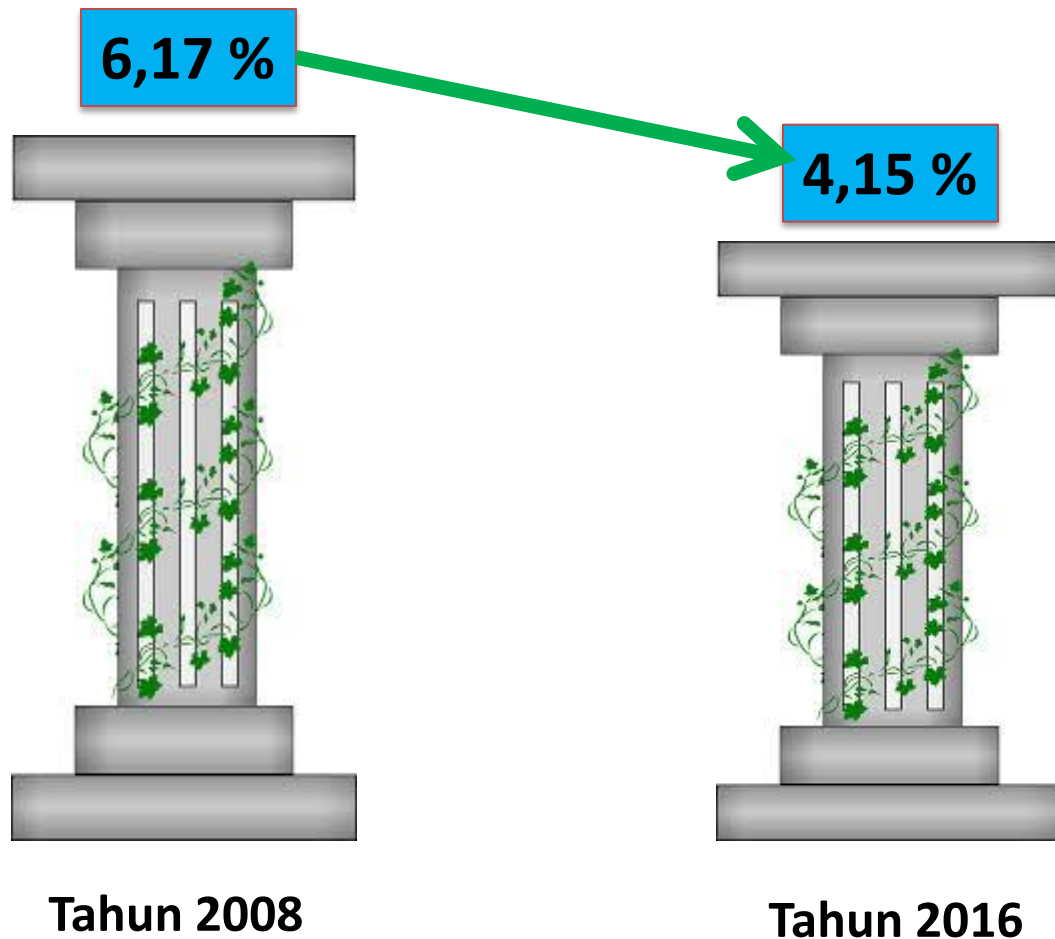
NASIONAL



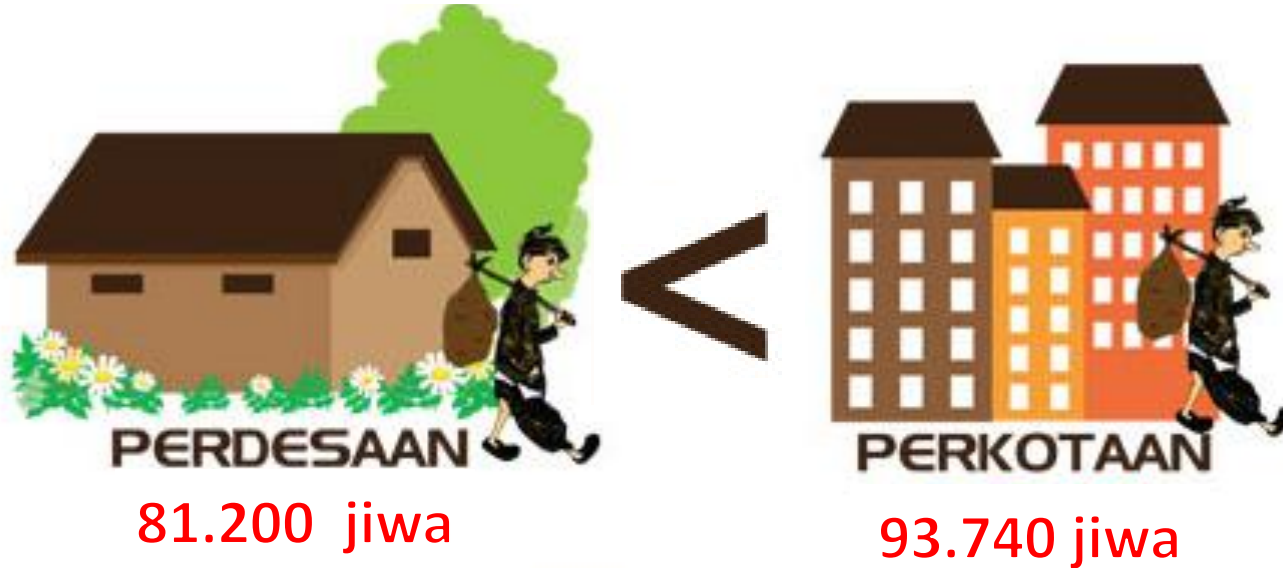
PERTUMBUHAN EKONOMI BALI DAN NASIONAL TAHUN 2013-2016



ANGKA KEMISKINAN PROVINSI BALI TAHUN 2008 - 2016

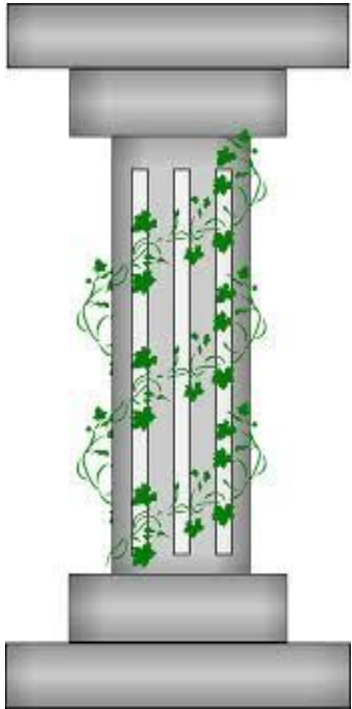


JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PERDESAAN LEBIH KECIL DARIPADA DI PERKOTAAN



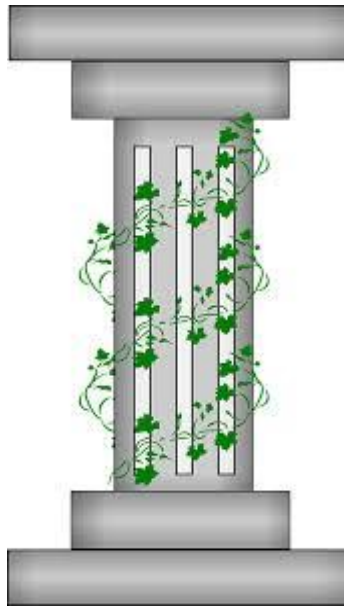
TINGKAT PENGANGGURAN PROVINSI BALI TAHUN 2008 - 2017

3,31 %



Tahun 2008

1,28 %



Tahun 2017

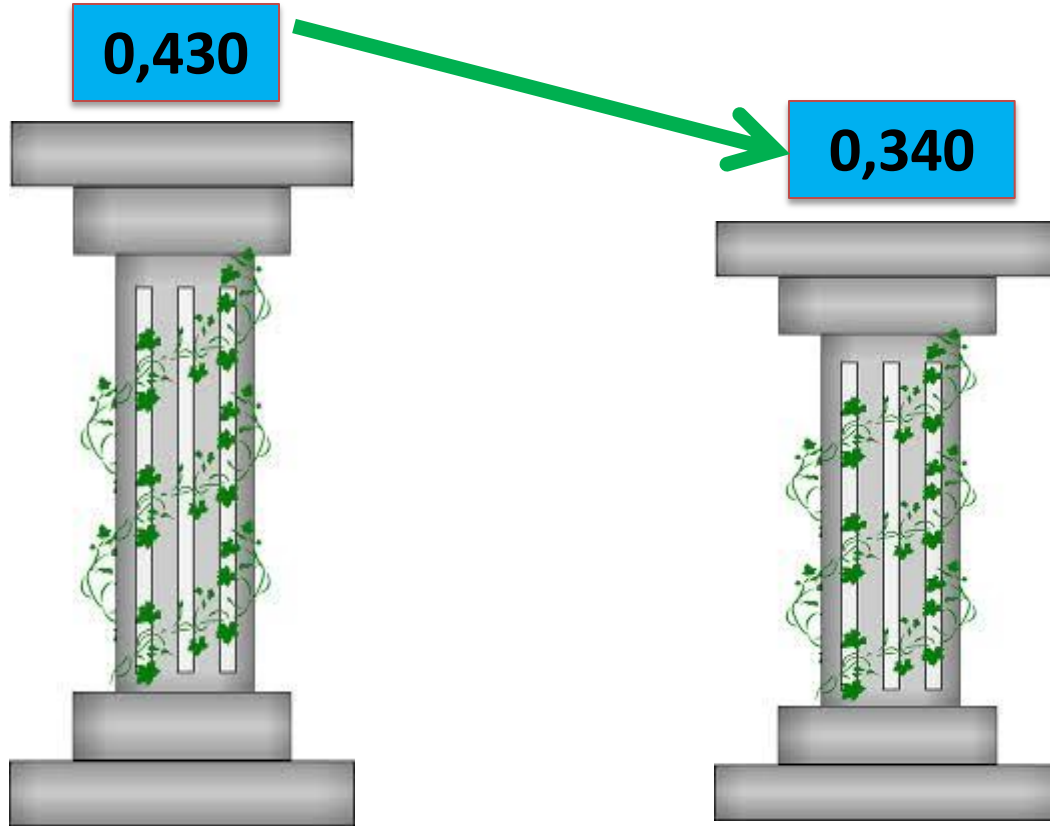


Pada Bulan Pebruari 2017 Posisi Tingkat Pengangguran Bali
No. 1 Terendah di Indonesia

PENGANGGURAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
PEBRUARI 2016 – PEBRUARI 2017

PENDIDIKAN	PEBRUARI 2016	AGUSTUS 2016	PEBRUARI 2017
SD Ke Bawah	1,64	0,30	0,43
Sekolah Menengah Pertama	2,15	0,65	2,47
Sekolah Menengah Atas	2,65	2,17	1,28
Sekolah Menengah Kejuruan	3,01	3,96	1,06
Diploma I/II/III	2,06	4,44	1,34
Universitas	1,81	4,35	2,78
Jumlah	2,12	1,89	1,28

INDEKS GINI RATIO BALI TAHUN 2012-2015



Tahun 2012

Tahun 2016

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| ➤ $GR \leq 0,20$ | ➔ Ketimpangan Sangat Rendah |
| ➤ $0,20 < GR \leq 0,39$ | ➔ Ketimpangan Rendah. |
| ➤ $0,39 < GR \leq 0,59$ | ➔ Ketimpangan Sedang. |
| ➤ $0,59 < GR \leq 0,79$ | ➔ Ketimpangan Tinggi. |
| ➤ $GR > 0,79$ | ➔ Ketimpangan Sangat Tinggi |





Matur Suksma

Om Santhi, Santhi, Santhi Om